

BAB III

TENTARA PEMBEBASAN RAKYAT (TPR) SEBAGAI PILAR PERTAHANAN DI CHINA

A. Sejarah Pembentukan Tentara Pembebasan Rakyat

Sejarah kemiliteran China sama tuanya dengan sejarah negeri China sendiri dan oleh karenanya pikiran-pikiran tradisional banyak mempengaruhi sikap dan pikiran-pikiran dasar kemiliteran sampai kini. Dalam masyarakat tradisional China, tentara selalu dipandang sebagai kelas yang terendah dalam jenjang tangga kedudukan social, tentara diperlukan untuk menghadapi bahaya, akan tetapi segera harus dikembalikan pada kedudukannya yang rendah begitu bahaya berlalu.

Dalam sejarah China yang penuh dengan pertentangan dan perjuangan untuk merebut kekuasaan, kaisar atau suatu dinasti jatuh dan diganti dengan orang kuat lainnya berkat dukungan tentara. Namun begitu seseorang berhasil menduduki kekuasaan para panglima yang setia selalu segera disingkirkan, khawatir kalau-kalau salah seorang panglima akan menjadi terlalu populer dan mendongkelya dari tahta itu. Maka tradisi China menempatkan tentara di bawah pimpinan politik, sebagaimana dictum Mao Tse Tung yang terkenal, bahwa “kekuasaan politik tumbuh dari laras bedil tetapi bedil itu sendiri harus sepenuhnya terkendali oleh Partai”. Pendapat demikian tidaklah berbeda bahkan paralel dengan pendapat politik umumnya di dunia, namun bagi RRC dictum itu merupakan persoalan besar di dalam kehidupan politik di RRC. Manifestasi dari persoalan itu nampak dalam krisis-krisis kepemimpinan nasional dan partai, dimana pihak-pihak yang beraspirasi untuk menjadi ketua partai saling berebut pengaruh di Tentara Pembebasan Rakyat (TPR).

Di lain pihak keadaan demikian memungkinkan tokoh-tokoh pimpinan dalam TPR untuk ikut memainkan peranan politik yang banyak kali menentukan, berhubung TPR cenderung untuk terlibat di dalam masalah-masalah politik, apalagi karena sebagian besar pimpinan TPR berasal dari pejuang-pejuang bermotif politik.

Mao selalu berusaha memelihara sifat kerakyatan TPR. Profesionalisme dikalangan TPR ditentang karena dipandang sebagai suatu yang akhirnya akan menjauhkan TPR dari rakyat. Maka di dalam TPR pun Mao berusaha memelihara berlakunya prinsip-prinsip kesamarataan (egalitarian principles), mencegah timbulnya elite baru di dalam masyarakat komunis yang ia cita-citakan. Bagi Mao Tse Tung yang berhasil memenangkan revolusi komunis dengan memanfaatkan kekuatan pokok juga dalam pertahanan. Maka sebagaimana nanti dapat terbaca dalam uraian selanjutnya pertahanan RRC disusun “in depth” (mementingkan ke dalam di dalam pertahanan). Dilema politik diatas ia coba selesaikan dengan anjuran agar setiap orang supaya tidak saja menjadi “ahli” (expert) dalam bidang pekerjaan masing-masing, akan tetapi juga harus menghayati ideology komunis (red). Maka “red and expert” merupakan slogan yang penting di jaman Mao.

Selain dilema diatas, RRC juga menghadapi dilemma teknis kemiliteran. Luas wilayah RRC dan jumlah rakyatnya yang begitu besar, memungkinkan Mao dan kawan-kawan seperjuangannya untuk mengetrapkan salah satu prinsip strategis yaitu “mengorbankan ruang untuk memperoleh waktu” (trading space for time) dalam perang gerilya yang sangat mobil. Dengan perkembangan teknologi persenjataan seperti dewasa ini, modernisasi TPR menghadapi kenyataan bahwa belum tentu prinsip strategi diatas dapat dilakukan lagi. Pembangunan TPR menghadapi dilema

didasarkan atas prinsip kualitas atautkah atas prinsip kuantitas. Meskipun Mao lebih cenderung pada prinsip kuantitas, mengingat keyakinannya akan kekuatan massa rakyat, tidak kurang gigihnya Mao mengembangkan juga kemampuan nuclear TPR, pertama-tama sebagai sebagai kekuatan “deterrent” disamping nilainya sebagai kebanggaan nasional dan “status symbol” bagi RRC. Modernisasi sekarang sedang dijalankan rupanya akan lebih mementingkan prinsip kuantitas, terbukti dari usaha RRC untuk membeli perlengkapan yang up-to-date bagi angkatan bersenjatanya.

Sejarah kemiliteran China menunjukkan pada suatu sikap mental yang perlu diperhatikan yaitu filsafat perang yang kurang mementingkan perebutan wilayah tetapi yang lebih mengutamakan perebutan mental (mind) lawannya. Dua kali China pernah terjajah, Mongol dan Manchu tetapi setiap kali justru penjajah yang akhirnya menjadi China dalam jiwa dan kebudayaannya. Bagi China perang dan damai adalah dua senjata yang saling mendukung (tercapainya tujuan-tujuan nasional) dan karena orang punya dua tangan kedua senjata dapat dipakai bersama-sama, untuk memperoleh effect psikologis yang dikehendaki. Maka tidak mengherankan bahwa bangsa-bangsa yang mengambil alih kebudayaan China melakukan bersamaan perang dan berunding seperti Vietnam dalam menghadapi Amerika sewaktu perang Vietnam yang lalu.

Kebudayaan China menghasilkan juga ahli-ahli pemikir kemiliteran bahkan Sun Tzu (400 SM) oleh dunia diakui sebagai guru utama dalam strategi. Tulisan-tulisan Sun Tzu ini menganggap peperangan sebagai hal yang tidak menguntungkan, merusak dan jahat. namun para filosof ini mengakui kenyataan bahwa peperangan/perjuangan merupakan bagian yang integrasi di dalam kehidupan manusia. Maka setiap orang

dianjurkan agar dalam perjuangan hidupnya pandai menyesuaikan dirinya, sebagaimana “air mengalir sesuai dengan keadaan tanah”.

Akal menempati tempat diatas kekuatan Sun Tzu menyatakan bahwa strategi yang benar adalah menghindari pertempuran. Jaya dalam seratus pertempuran bukanlah ukuran keterampilan tetapi memang tanpa pertempuran adalah keterampilan yang harus dipuji (the acme of skill). Maka sangatlah bijaksana bila musuh dapat ditundukkan tanpa banyak menimbulkan kerusakan pada negerinya. Lakukan subversi, rongrongan, hancurkan semangatnya, rusak ekonominya, pecah belah rakyatnya maka tentara musuh akan menyerah padamu, kata Sun Tzu. Semua peperangan berdasarkan tipu muslihat, maka tujuan sebenarnya dari peperangan harus disembunyikan. Kalau kuat, berlagalah seperti lemah, kalau dekat dengan kedudukan musuh usahakanlah agar musuh mengira pasukan masih jauh dan serang musuh sewaktu musuh tidak bersiap-siap. Ajaran-ajaran seperti ini menggambarkan konsep strategi dan taktis bangsa China yang sangat mempengaruhi Mao Tse Tung dalam mengembangkan perang gerilya terhadap Jepang dan Kuo Min Tang. Besar wilayah dan jumlah rakyat China memungkinkan pelaksanaan konsep-konsep strategis dan taktis diatas, suatu manifestasi dari inti ajaran Taoisme bahwa “yang lembut dan kenyal akhirnya mengalahkan yang keras dan kaku”.

Sikap dasar bangsa China sepanjang sejarahnya adalah defensif, terpengaruh oleh pengalaman bangsa itu selama ribuan tahun bahwa ancaman terhadap kesejahteraan bangsanya datang dari Utara. Sikap itu tampak dari Tembok Besar diperbatasan untuk mencegah serbuan bangsa-bangsa yang “biadab” dari sebelah Utara. Namun Tembok Besar tidak mampu mencegah penyerbuan dan penjajahan

bangsa Mongol dan Manchu selama ratusan tahun. Bangsa China menamakan negerinya sebagai “Kerajaan Tengah” (Tiongkok) timbul dari keyakinannya bahwa kebudayaannya dan peradabannya adalah yang tertinggi di dunia dan menganggap dirinya sendiri berada di tengah-tengah dunia yang “biadab” atau “kurang beradab”. Berdasarkan atas pandangan tersebut, dunia dalam pandangan klasiknya dibagi dalam empat lingkaran konsentris :

- a. Lingkaran dalam adalah wilayah China termasuk Tibet dan Mongolia.
- b. Lingkaran kedua terdiri dari Negara-negara sekitarnya dipinggiran lingkaran dalam yang dianggap sebagai daerah “tributaries” mereka termasuk Korea dan Vietnam .
- c. Lingkaran ketiga adalah Jepang.
- d. Lingkaran keempat adalah sisa dunia.

Pandangan klasik ini sampai kini masih mempengaruhi persepsi RRC mengenai keamanan nasionalnya, terbukti dari sikap RRC terhadap masalah-masalah perbatasan, masalah Mongolia dan Manchuria, masalah Korea dan Vietnam. Jepang sebagai lingkaran ketiga dipandang sebagai factor yang dapat mengancam kelestarian bangsa China.

Periode Melawan Jepang dan KMT

Sebagaimana diketahui penumbangan Dinasti Manchu oleh revolusi China di bawah Dr. Sun Yat-sen berhasil membebaskan diri dari penjajahan Manchu tetapi tidak berhasil melepaskan diri dari pengaruh kaum kolonialis Barat dan Jepang. Bahkan Jepang masih bercokol di Korea, Manchuria dan Shanghai. Revolusi yang tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat China ternyata justru menimbulkan perpecahan diantara kekuatan-kekuatan

social. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh kaum komunis dunia untuk mendirikan Partai Komunis China pada tahun 1921 yang tadinya mengikuti model Rusia didasarkan atas kekuatan buruh tetapi setelah Mo Tze-tung pegang pimpinan lalu didasarkan atas kekuatan massa petani.

Baru pada 1 Agustus 1927 berhasil mendirikan Tentara Merah sebagai manifestasi dari pendirian Mao bahwa “kekuatan politik tumbuh dari laras bedil”. Kelahiran itu terjadi di Kota Nanchang di bawah pimpinan Chu The. Pada mulanya TPR terdiri dari tentara 11 (Yen Ting) dan tentara ke-20 (Ho Lung) dengan sisa-sisa tentara Chu The.

Sungguhpun dari semula PKC dengan TPR-nya berdasarkan petunjuk Moskow harus bekerjasama dengan KMT, PKC selalu berusaha untuk merongrong dan memanfaatkan KMT untuk kepentingan politik sendiri. Dalam hal ini nampak bahwa usaha mereka adalah untuk merebut rakyat ke pihaknya, maka TPR selalu diusahakan agar berintegrasi dengan rakyat (manunggal ikan dalam air). Usaha merebut hati rakyat itu antara lain terwujud dalam instruksi kepada semua prajurit mereka untuk :

- a. Selalu taat dan mengerjakan semua perintah.
- b. Tidak mengambil apapun dari rakyat jelata.
- c. Agar semua barang rampasan/hasil perang dikumpulkan untuk dipakai bagi semua pasukan.

Disamping itu TPR juga aktif dalam program politik partai, antara lain dalam :

- a. Membagi-bagi tanah yang diambil dari tuan-tuan tanah.
- b. Pendidikan kaum petani.
- c. Pembentukan pemerintah local (bayangan)
- d. Pendidikan kader-kader komunis.

Setelah Chiang Kai-shek menggantikan kedudukan Dr. Sun Yat-sen, sikap anti komunisnya makin menonjol. Meskipun menghadapi musuh bersama (Jepang), Chiang Kai-shek menilai kaum komunis sebagai “kanker” yang dapat mematikan bangsa China sedangkan Jepang disamakan dengan “penyakit kulit” dan begitu kanker di tubuh bangsa Cian dapat dihapuskan, penyakit kulit itu mudah dibasmi. Namun secara resmi kerjasama dengan komunis tetap dipelihara walaupun kedua belah pihak dalam setiap kesempatan berusaha menghancurkan yang lain. Dalam periode itu tumbuh strategis dan taktik perang gerilya yang dikembangkan oleh Mao dan TPR dari filsafat dan teori perang Sun Tze.

Kemanunggalan dengan rakyat tetap menjadi pedoman pokok meskipun TPR pada tahun 1937 resmi diakui sebagai tentara nasional dan dikenal sebagai “8 th Route Army”, yang terdiri dari Divisi 115 (Lin Piao), Divisi 120 (Ho Lung) dan Divisi 129 (Lin Po-cheng). Mao mengeluarkan 8 perintah pokok kepada TPR :

- a. Berlaku sopan santun terhadap rakyat.
- b. Jujur dalam melakukan pembelian-pembelian.
- c. Kembali semua barang pinjaman.
- d. Bayar semua barang yang dirusakkan.
- e. Jangan menakuti rakyat.
- f. Jangan merusak tanaman rakyat.
- g. Jangan main-main dengan wanita.
- h. Perlakukan tawanan secara wajar.

Perintah ini juga merupakan pelaksanaan teori perang para filosof China kuno, dalam rangka merebut hati (mind) rakyat yang akhirnya menjadi sebab utama keruntuhan Chiang Kai-shek.

Pengalaman perang gerilya ini memberikan cap khusus pada TPR dan revolusi komunis China yang dimenangkannya dengan mendasarkan diri pada kekuatan kaum petani. Namun Perang Korea membuka mata TPR bahwa kekuatan massa saja di medan yang sempit dan bergunung tidak selalu memberikan keunggulan terhadap daya tembak dan daya gerak suatu tentara modern. Pengalaman itu membuat RRC merubah cara berpikir pimpinannya terutama Chu The untuk memodernisir TPR. Tetapi usaha pertama modernisasi TPR dihentikan oleh Mao karena dikhawatirkan akan menumbuhkan semangat profesionalisme dan akhirnya akan timbul elit baru yang akan menjauhkan TPR dari rakyat China.

B. Karakteristik Peran TPR Dalam Politik RRC

Setelah berdirinya RRC, TPR memainkan peran penting dalam masalah domestik yaitu dengan memberikan dukungan penuh kepada PKC untuk mempersatukan dan memerintahkan negara yang baru berdiri tersebut. Hubungan partai-militer berkembang semakin erat sehingga sampai saat ini militer China masih menjadi kekuatan utama dalam politik di China.

Keeratan hubungan partai-militer membuat militer menjadi grup yang dominan dalam masyarakat dan institusi-institusi militer telah memainkan perang yang dominan dalam pembangunan politik China.¹ Kepemimpinan partai, telah banyak bergantung pada anggota partai dalam militer untuk melaksanakan tugas politik dan mengembalikan keteraturan. Partai juga telah menggunakan militer sebagai alat intimidasi dalam persaingan memperebutkan kekuasaan politik dan suksesi.

¹ James C.F, Wang, *Contemporary Chinese Politics : An Introduction*, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1992, hal 10.

Analisa mengenai hubungan partai-militer di China pada dasarnya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu control partai, simbiosis dan profesionalisme.² Ketiga pendekatan ini ini tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi karena masing-masing menyoroti elemen hubungan partai-militer China.

Menurut Ellis Joffe, hubungan partai-militer di China ditandai oleh karakteristik yang berlawanan. Meskipun dikontrol oleh partai, militer memiliki ciri-ciri dasar profesionalisme sehingga selalu ada konflik yang permanen dan fluktuatif antara partai-militer. Pada puncak kekuasaan, terjadi hubungan simbiosis antara para pemimpin partai dan militer. Namun demikian, modernisasi angkatan bersenjata dan profesionalisme militer menimbulkan terjadinya pemisahan fungsional di tingkat yang paling rendah. Meskipun terpengaruh oleh faksionalisme dalam partai, komando dan sistem control militer tetap utuh dan persatuannya secara keseluruhan tidak terpecah.³

Dengan karakter seperti itu dapat dikatakan bahwa Militer China merupakan tentara partai yang memiliki ciri profesionalisme. TPR memang tidak bisa menjadi tentara profesional dalam pengertian Barat, yang memisahkan militer dari politik, karena kondisi perkembangannya yang berbeda dengan militer di Barat disamping adanya sifat-sifat dari rezim pemerintahan China. Disisi lain, militer China tidak tunduk begitu saja pada partai karena profesionalisme para perwiranya mendorong mereka untuk mempertanyakan kebijakan partai jika kebijakan tersebut dianggap tidak sejalan dengan pendapat mereka.

Menurut Ellis Joffe, hubungan partai-militer di China ditandai oleh 6 (enam) pola utama yaitu :

² David Shambaug, "China's Military in Transition : Politics, Professionalism, Procurement and Power Projection", dalam The China Quarterly No 146, Juni 1996, hlm 268.

³ Ellis Joffe, "Party-Army Relations in China : Retrospect and Prospect", dalam The China Quarterly No.146, Juni 1996, hlm 300.

1. Integrasi di tingkat puncak kepemimpinan

Dekatnya integrasi para pemimpin partai-militer di tingkat teratas perumusan kebijakan merupakan faktor utama yang menyebabkan militer memiliki peran politik dan militer. Hal ini terus berlanjut meskipun struktur hirarki kekuasaan telah terbentuk setelah rezim komunis berdiri tahun 1949, sehingga perbedaan peran para pucuk pimpinan tetap tidak jelas. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan fungsi, para pucuk pimpinan partai bertanggung bahwa melintasi batasan antara kedua lembaga merupakan hal yang sah dan wajar. Mereka menganggap hal tersebut bukan sebagai suatu intervensi satu lembaga atas lembaga lainnya.

Hal yang paling signifikan dari integrasi ini adalah bahwa pemimpin negara seperti Mao Zedong dan Deng Xiaoping juga merupakan komandan tertinggi dan aktif dalam militer China. Kedudukan mereka yang khusus tersebut membuat mereka mampu menggunakan militer sebagai dasar kekuasaan mereka dalam elit politik. Baik Mao maupun Deng sama-sama menyadari bahwa mereka bisa mengandalkan dukungan dari militer China pada saat kepemimpinan partai mendapat tantangan.

Integrasi di tingkat puncak kekuasaan juga memungkinkan para pemimpin militer untuk berpartisipasi dalam politik sebagai figure nasional, bukan sebagai wakil militer. Kritik Peng Dehuai terhadap kebijakan Lompatan Jauh ke Depan pada tahun 1959 merupakan contoh partisipasi militer dalam politik. Selama bertahun-tahun para pemimpin militer yang menjadi anggota politburo turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan mengenai masalah-masalah nasional.

Pada saat yang sama, para pemimpin militer ini juga memiliki kedudukan tinggi dalam militer dan merupakan “suara” bagi kelompok militer dalam dewan partai. Ketidakpuasan militer terhadap alokasi anggaran sejak awal reformasi sampai akhir tahun 1980-an terus disuarakan oleh pemimpin-pemimpin senior

militer. Meskipun demikian, mereka tidak pernah menggunakan tentara untuk kepentingan mereka. Intervensi TPR dalam Revolusi Kebudayaan maupun dalam peristiwa Tiannamen dilakukan tanpa persetujuan pemimpin-pemimpin militer.

2. Pemisahan pada tingkat bawah

Kedekatan hubungan antara pemimpin partai dan militer hanya terjadi di tingkat paling atas. Di tingkat yang lebih rendah justru terjadi pemisahan hirarki, fungsi dan tanggungjawab. Meskipun selalu berusaha mengontrol militer, partai tidak bisa mencegah perkembangan organisasi militer yang besar yang diatur oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang kadang-kadang tidak sejalan dengan kepentingan partai. Pemisahan inilah yang menyebabkan militer cenderung untuk tidak terlibat dalam politik.

Pemisahan antara partai-partai di tingkat lokal mengalami kehancuran pada masa Revolusi Kebudayaan. Militer, yang diperintahkan untuk terlibat dalam pertentangan berskala nasional, dengan cepat mengambil alih fungsi partai sebagai organ tertinggi, secara tidak langsung dengan mendominasi Komite Revolusi maupun secara langsung dengan membentuk Komite Pengawasan Militer. Karena keadaan ini, TPR (militer China) menjadi pemilik wewenang politik dan administrasi tertinggi di tingkat propinsi setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan, meskipun komite partai lokal telah diperintahkan untuk mengambil alih kembali kekuasaan dari TPR.

Setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, Deng Xiaoping membebastugaskan para komandan militer dari pos-pos dan melakukan reshuffle serta pergantian pemimpin-pemimpin militer di propinsi-propinsi untuk memutuskan kekuatan informal yang mereka miliki melalui lamanya jangka waktu mereka menjadi komandan di wilayah yang sama. Sejak saat itu, militer berada terpisah dari struktur kekuasaan di tingkat propinsi dan municipal. Lahirnya kembali modernisasi militer di masa Deng Xiaoping merupakan sebab

utama terjadinya pemisahan militer dari politik. TPR kemudian berkembang menjadi suatu organisasi yang besar dan kompleks yang memiliki kepentingan sendiri karena diterapkannya doktrin baru, kebutuhan akan teknologi baru serta pembentukan unit-unit mutakhir. Akibatnya TPR tidak ingin terlibat dalam politik, meskipun para pemimpin partai mampu melakukan hal itu, karena TPR memiliki kepentingan sendiri yang jelas berbeda dengan kepentingan partai. Keterlibatan dalam politik justru membuat militer harus mengorbankan kepentingannya.

3. Modernisasi dan Profesionalisme

Dasar bagi pemisahan antara partai militer adalah profesionalisme para perwira militer. Perkembangan profesionalisme TPR tidak lepas dari pelaksanaan modernisasi. Proses modernisasi telah menghasilkan korps perwira yang memiliki keahlian khusus untuk melaksanakan komando dan mengatur institusi militer yang kompleks.

Korps perwira militer mulai muncul pada pertengahan tahun 1950-an dan terdiri dari 2 (dua) kelompok yang berbeda, yaitu (a) kelompok yang bergabung dengan TPR setelah perjuangan dan mendapat pendidikan di akademi-akademi militer yang mendapat pengaruh dari Uni Soviet. Perang Korea telah menunjukkan kepada mereka mengenai pentingnya modernisasi militer dan perlunya transformasi militer pasca perang untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka inilah yang saat ini berada di jajaran teratas kepemimpinan TPR dan merupakan pengusung nilai-nilai keprofesionalan TPR; (b) kelompok yang terdiri dari para veteran perang yang tetap bertahan dalam militer setelah berdirinya rezim komunis. Pandangan mereka mengenai profesionalisme timbul karena nilai-nilai revolusioner mereka mulai memudar akibat keterlibatan mereka dalam masalah kompleks mengenai modernisasi militer. Dalam dewan-dewan tertinggi partai, mereka bertindak sebagai pemimpin nasional dan juru bicara korps perwira profesional.

Munculnya kelompok ini merupakan awal munculnya konflik yang menjadi komponen permanent dalam hubungan partai-militer sejak pertengahan tahun 1950-an. Konflik tersebut berkisar pada satu masalah konseptual yaitu bobot dari pertimbangan militer dan politis dalam menerapkan doktrin perang, kebijakan pembentukan kekuatan dan aktivitas harian TPR.

Sejak lompatan jauh kedepan sampai wafatnya Mao, modernisasi dan profesionalisme dalam TPR tidak menjadi prioritas karena keterlibatannya dalam pertarungan politik. Meskipun berada pada puncak keterlibatan yang traumatis, yaitu saat kontrol politik dalam TPR menjadi tidak aktif, profesionalisme dan nilai-nilai dasarnya seperti kedisiplinan dan komitmen terhadap persatuan nasional telah membentuk kekuatan tandingan terhadap kecenderungan-kecenderungan yang dapat membahayakan persatuan China.

Modernisasi militer kembali dijalankan setelah Deng Xiaoping berhasil meraih kekuasaan. Unit-unit militer dilepaskan dari keterlibatan politik dan peran politik dalam militer diperkecil. Keadaan ini membuka peluang bagi perkembangan profesionalisme. Reformasi militer yang dijalankan oleh Deng tidak akan dapat berhasil tanpa peningkatan sikap profesionalisme TPR yang ketat. Dalam satu decade pelaksanaan reformasi militer, profesionalisme TPR semakin besar.

Pecahnya peristiwa Tianamen menimbulkan menyangkut profesionalisme TPR.⁴ Setelah peristiwa itu, profesionalisme TPR menjadi sasaran perpecahan politik karena adanya kekhawatiran para komisaris partai dan militer terhadap sikap TPR yang tidak pasti dalam krisis tersebut. Keadaan ini berubah setelah pecah perang Teluk yang membuat TPR mendapat amunisi baru untuk meningkatkan standar militernya. Sejak itu, gangguan politis terhadap

⁴ Michael D. Swaline, *The Military and political Succesion in China*, Santa Monica : The RAND Corporation, 1992, hlm 160-168.

profesionalisme militer menjadi diperkecil. Namun demikian, ancaman terhadap profesionalisme itu muncul dalam bidang lain yaitu masuknya militer dalam dunia ekonomi.

4. Kontrol Politik terhadap TPR

Posisi TPR yang berada di bawah partai disebabkan oleh sistem kontrol politik yang diterapkan partai terhadap TPR. Dengan demikian dari sudut pandang ini, profesionalisme dan kontrol politik saling melengkapi. Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada satu kondisi tertentu yaitu saat komandan-komandan militer yang profesional tersebut merasa bahwa kontrol politik sudah semakin bertentangan dengan keahlian militer dan saat keadaan memungkinkan bagi mereka untuk menentang kontrol tersebut.

Kerangka kelembagaan untuk melaksanakan kontrol politik ini secara teoritis tidak mengalami perubahan sejak awal tahun 1950-an. Dalam kerangka kelembagaan tersebut komite-komite partai, komisaris-komisaris politik dan departemen-departemen politik berada sejajar dengan rantai komando militer.

Idealnya, kepemimpinan dalam angkatan bersenjata berdasarkan pada prinsip bahwa keputusan-keputusan dalam unit-unit militer dibuat oleh komite-komite partai dan dilaksanakan oleh para komandan dan komisaris sesuai dengan fungsi-fungsi mereka. Keadaan ini tidak sepenuhnya bisa terealisasi karena para perwira militer China yang telah memiliki sikap profesional memiliki kecenderungan untuk menentang sistem seperti itu. Alasan kecenderungan itu adalah bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan efektivitas tempur dalam sistem perang yang modern.

Pada saat Deng melaksanakan program modernisasi, aspek kontrol politik yang mencuat ke permukaan ditentang oleh kelompok militer yang profesional dan diredam secara radikal. Akibatnya, apapun teorinya, posisi komandan militer

dalam unit-unit militer menjadi dominan sedangkan tugas politik dalam TPR dipandang sebagai melayani kebutuhan-kebutuhan militer.

Penunjukan Yang Baibing sebagai direktur Departemen Politik Umum (General Political Department) telah memperkuat institusi tersebut beserta seluruh sistem kontrol politik yang berada dibawahnya. Setelah peristiwa Tiananmen, Yang Shangkun ditunjuk sebagai wakil ketua pertama Komisi Urusan Militer (*Military Affairs Commission*) sedangkan Yang Baibing menjadi Sekjenya. Ini memberikan kekuatan pada keduanya untuk mengontrol TPR, terutama mengenai masalah yang sensitif menyangkut masalah-masalah personalia, sehingga mereka mampu untuk menempatkan pendukung-pendukung mereka pada posisi kunci. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kejatuhan mereka pada tahun 1992, saat Deng menganggap mereka terlalu berkuasa dan ambisius.⁵ Kejatuhan mereka dipermudah oleh keterasingan Yang Baibing dari militer profesional karena ia bertanggungjawab atas serangan keras terhadap TPR setelah intervensi militer dalam peristiwa Tiananmen. Tema yang memicu kritik tersebut adalah bahwa indoktrinasi dan peran serta tujuan politik merupakan hal yang paling penting dalam TPR, sedangkan militer profesional dipandang dengan penuh kecurigaan. Sejak itu, kontrol politik atas TPR dikembangkan kepada formula Deng yaitu bahwa indoktrinasi dan pengawasan organisasi militer merupakan hal yang penting tetapi tidak boleh mencampuri hak profesional para komandan TPR. Hal ini dapat diterima oleh militer sehingga hubungan partai-militer dalam masalah kontrol politik terhadap TPR tidak ditandai oleh friksi yang serius.

Kontrol politik partai terhadap militer dilaksanakan oleh Komisi Urusan Militer, posisi yang diklaim oleh Deng Xiaoping pada saat ia kembali ke panggung politik RRC tahun 1978. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas komisi tersebut bagi kekuasaan Deng. Komisi ini yang merupakan badan dalam

⁵ Willy Wo-Lap Lam, *China After Deng Xiaoping : Power Struggle in Beijing since Tiananmen*, Singapore : John Willey & Sons, 1995, hlm 211-216.

partai yang mengontrol militer, mengawasi seleksi dan pemberhentian personel militer, menetapkan kriteria bagi seleksi dan promosi dalam tingkatan di TPR. Komisi ini juga menetapkan strategi dan taktik militer, mengubah struktur komando dan memutuskan aktivitas harian TPR di masa damai.⁶ Dengan kekuasaan yang besar ini, pemimpin partai yang dapat mengendalikan kontrol terhadap Komisi ini akan memiliki kemampuan untuk membawa TPR berkurang dengan dilaksanakannya program modernisasi militer, terdapat upaya yang besar untuk memperkuat kontrol partai terhadap militer semenjak peristiwa Tiananmen. Hubungan TPR dengan partai diarahkan kembali ke ungkapan Maois bahwa “Merah” lebih penting dari “keahlian”.⁷ Hal ini disebabkan oleh keragu-raguan para pemimpin partai terhadap kesungguhan militer dalam melaksanakan perintah pada saat peristiwa tersebut.

5. Komando dan kontrol terhadap TPR

Kondisi penting dari pola ini adalah tunduknya TPR terhadap komando tertingginya yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

- (a) Sistem komando dan kontrol dalam TPR adalah sistem yang tersentralisasi. Perintah dikirimkan dari Komisi Urusan Militer (*Military Affairs Commission*) dan Departemen Staff Umum (*General Staff Departemen*) ke unit-unit yang ada dibawahnya, melalui wilayah-wilayah militer ke eselon-eselon yang lebih rendah. Tujuan utamanya adalah agar seluruh unit dalam TPR beroperasi hanya pada saat dan dalam bentuk yang diperintahkan oleh komando pusat;
- (b) Dengan beberapa pengecualian, unit-unit dalam TPR tidak pernah berusaha melakukan suatu tindakan tanpa atau dengan melanggar perintah. Pengecualian yang serius terjadi pada saat Revolusi

⁶ Suzanne Ogden, *China's Unresolved Issues: Politics, Development and Culture*, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1989, hlm 91-92.

⁷ Harlan W. Jenks, “*Party Authority And Military Power: Communist China's Continuing Crisis*”, dalam Bih-jaw Lin etc(eds), *The Aftermath of the 1989 Tiananmen Crisis in Mainland China*, San Fransisco: Westview Press, 1993, hlm 150.

Kebudayaan, yaitu ketika para komandan TPR lokal bertindak sendiri karena tidak adanya perintah yang jelas, atau menghadiri perintah seperti menekan kebrutalan Pengawal Merah. Pengecualian ini adalah selama fase awal krisis Tiananmen, ketika terjadi ketidakpastian diantara para komandan senior dan beberapa unit menunjukkan keengganan selama pelaksanaan keadaan darurat. Kedua pengecualian tersebut terjadi karena ketidakpastian di tingkat puncak. Pada saat pejabat-pejabat di tingkat pusat kembali menerapkan kontrol yang ketat, TPR kembali bersikap disiplin.

(c) Pejabat-pejabat di tingkat pusat menerapkan kontrol yang ketat terhadap para komandan militer di tingkat wilayah. Kontrol tersebut dilakukan dengan memindahkan, mengganti atau merubah posisi komandan-komandan militer sampai di tingkat resimen dengan menjalankan mekanisme pengawasan dan kontrol politik. Tindakan tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan atau sebagai respon atas tindakan yang mencurigakan. Kekuasaan dari komando tertinggi dalam hal ini sangat besar, tercermin dari beberapa perubahan besar yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa komando tertinggi TPR mampu mengontrol TPR secara efektif dan TPR sendiri terbukti merupakan tentara yang disiplin. Kedisiplinan itu mulai terkikis akibat keterlibatan militer dalam ekonomi.

6. Tentara yang non-interventionist

Meskipun para pemimpin politik dalam militer kerap melibatkan TPR dalam politik, seperti pada masa Revolusi Kebudayaan dan pada saat pecahnya peristiwa Tiananmen, para pemimpin militer sendiri sebenarnya tidak pernah menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai kepentingan-kepentingan sektoral mereka. TPR tidak pernah menggunakan kekuatan dalam kancah politik atas inisiatifnya sendiri. Intervensi militer dalam politik biasanya

terjadi pada saat pemerintah gagal dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan kehilangan legitimasinya. Alasan lain adalah pada saat kepentingan militer tidak dapat dipenuhi oleh pemimpin sipil⁸ Namun demikian, intervensi TPR secara keseluruhan dalam politik adalah atas perintah dari Mao dan Deng.

Intervensi besar-besaran TPR terjadi selama Revolusi Kebudayaan ketika partai dan organ-organ pemerintah lainnya dihancurkan oleh Pengawal Merah sehingga mengakibatkan terjadinya kekacauan. Tujuan dari intervensi itu adalah untuk mengembalikan keteraturan yaitu dengan membentuk badan-badan eksekutif yang dipimpin militer atau dengan memerintah secara langsung. Dengan demikian, TPR telah menjadi penguasa yang efektif di propinsi-propinsi China ketika Revolusi Kebudayaan berakhir tahun 1969.

Meskipun membutuhkan waktu yang lama, pada akhirnya TPR bersedia untuk melepaskan kedudukannya itu. Proses tersebut baru dapat diselesaikan dengan jatuhnya kelompok radikal dan naiknya Deng Xiaoping. Dengan dukungan Deng, TPR dipindahkan dari kekuasaan politiknya dan dari tugas tugas non militer di semua tingkat.

Intervensi kedua TPR adalah peristiwa Tiananmen. Namun keterlibatan TPR dalam krisis Tiananmen tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai intervensi. Yang terjadi di Tiananmen pada bulan Juni 1989 itu adalah tindakan penguasa terhadap rakyatnya dengan menggunakan kekuatan militer. Militer tidak melibatkan diri untuk menyelesaikan pertentangan antar faksi atau untuk mendukung salah satu kelompok dalam kepemimpinan. Militer juga tidak bermaksud untuk melakukan kudeta. Dalam peristiwa itu, militer diperintahkan untuk meredam para demonstran.

⁸ Eric A Nordlinger, *Soldiers in Politics : Military Coups and Governments*, New Jersey : Prentice Hall, 1977, hlm 63-64.

Dari ke 6 (enam) pola hubungan yang dikemukakan oleh Ellis Joffe tersebut, dapat terlihat bahwa TPR merupakan tentara yang memiliki dasar profesionalisme sekaligus juga memiliki peran politik yang menentukan. Program modernisasi militer yang dijalankan Deng Xiaoping ditujukan untuk membuat TPR menjadi lebih profesional disamping untuk mengurangi keterlibatan militer dalam politik dan memperkecil pengaruh politik dalam militer. Profesionalisme ini membuat perwira-perwira militer cenderung ingin mengurangi kontrol partai dalam militer, memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan masalah-masalah militer serta lebih memilih untuk tidak terlibat dalam politik. Namun demikian, sikap militer yang kurang antusias melaksanakan perintah partai menyebabkan pemimpin partai merasa perlu untuk memperketat kontrol partai atas militer yaitu dengan mengangkat pemimpin-pemimpin militer yang sejalan dengan kelompok atau koalisi faksi dalam partai yang menjalankan pemerintahan.

C. Tentara Pembebasan Rakyat Pasca Deng Xiaoping

Pola hubungan partai-militer ini mengalami perubahan atau pergeseran, terutama ditingkat pucuk pimpinan karena wafatnya Deng Xiaoping dan pemimpin-pemimpin generasi pertama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prestise, prestasi dan jaringan pendukung dari para penerus tersebut sehingga wewenang mereka terutama terletak pada posisi institusional mereka, bukan pada figure personal maupun jaringan hubungan mereka. Dengan demikian terjadi pemisahan institusi yang jelas antara partai dan militer sehingga para pemimpin partai maupun militer tidak memiliki kewenangan, untuk melewati batasan antara partai dan militer seperti yang dimiliki oleh pendahulu mereka. Keadaan ini akan menimbulkan adanya pemisahan di tingkat puncak kepemimpinan antara partai dan institusi militer.

Karena faktor figur dan jaringan hubungan masih merupakan suatu hal yang penting dalam politik di China, posisi mereka terhadap TPR menjadi lemah. Untuk itu, Jiang Zemin dan pendukungnya berusaha untuk mencari dukungan dari

TPR dengan jalan meningkatkan anggaran belanja militer, promosi bagi para komandan militer senior dan kunjungan Jiang Zemin ke unit-unit TPR.⁹ Meskipun demikian, upaya Jiang ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa militer mau sepenuhnya memberikan dukungan yang diperlukan Jiang untuk mempertahankan posisinya dalam partai maupun pemerintahan.

Adanya pemisahan di tingkat puncak tentunya akan diikuti pula oleh pemisahan kekuasaan antara partai dan organisasi-organisasi militer yang berada di bawahnya. Partai akan terus melakukan kontrol politik tetapi fungsi-fungsinya akan lebih dibatasi dan tidak terlalu turut campur dalam masalah-masalah militer. Sedangkan TPR akan menjadi lebih kompleks, lebih spesialis dan lebih focus ke dalam masalah-masalah internnya sebagai dampak modernisasi. Dengan dilaksanakannya modernisasi, terdapat perbedaan yang semakin tajam antara partai-militer dalam hal kepentingan, fungsi dan cara pandang. TPR akan semakin berusaha untuk tidak terjebak dalam pertentangan politik karena hal tersebut hanya akan merugikan kepentingannya. Adanya perbedaan pada tingkat tertinggi kepemimpinan dan pemisahan pada hirarki partai maupun militer membuat pemimpin-pemimpin partai semakin sulit untuk melibatkan militer dalam politik sehingga militer semakin terlibat dalam masalah-masalah politik.

Kecenderungan ini diperkuat dengan berlanjutnya modernisasi dan profesionalisme dalam tubuh angkatan bersenjata China. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai selama era reformasi, TPR masih mengalami ketertinggalan dalam beberapa masalah yang sangat penting dan mendasar. Oleh karena itu, masalah modernisasi militer terus menjadi perhatian para pemimpin militer abad 21 ini. Modernisasi ini muncul dari nasionalisme China yang tujuan utama luar negerinya dalam periode ini adalah mencapai status kekuatan adidaya dan supremasi regional.¹⁰ Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, China memerlukan militer yang kuat dan dihormati negara-negara lain. Suatu hal yang masih harus diperjuangkan oleh China.

⁹ Ellis Joffe, *“Party-Army Relations in China : Retrospect and Prospect”*, Loc.Cit, hlm.309.

¹⁰ Ellis Joffe, *Opcit*.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam program modernisasi militer memperkuat pula profesionalisme militer. Semakin kuat profesionalisme tersebut, TPR akan semakin disibukkan dengan masalah-masalah militer. Profesionalisme tersebut akhirnya mendorong perwira-perwira militer untuk menuntut ruang gerak yang lebih besar dalam menetapkan masalah-masalah militer termasuk dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Keadaan ini mendorong pula sikap pemimpin partai generasi baru yang mengurangi kontrol politik dalam militer dan memberikan banyak konsesi dengan tujuan mencari dukungan untuk mempertahankan posisi mereka dan kekuasaan partai, mengingat mereka tidak memiliki latar belakang militer maupun koneksi yang kuat di kalangan militer. Perintah Deng Xiaoping agar TPR menjaga stabilitas partai dan mendukung Jiang Zemin sebagai penggantinya telah memberikan pengaruh yang besar bagi TPR dalam ikut menentukan keputusan penting dalam kepemimpinan.¹¹ Dengan demikian, TPR menjadi kekuatan penyeimbang yang menjamin perkembangan RRC di masa datang. TPR juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai kelompok penekan yang otonom setelah pada masa Mao dan Deng posisi mereka berada dibawah kontrol kedua pemimpin tersebut sehingga kepentingan militer terabaikan.

Dengan demikian, akan ada sikap saling memberi dan menerima dalam hubungan antara para pemimpin partai dan militer. Pemimpin partai akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada militer untuk menjalankan masalah-masalah militer dan memberikan jaminan bahwa kepentingan-kepentingan militer akan mendapat perhatian yang sangat besar. Sebaliknya, militer akan memberikan dukungan kepada kepemimpinan partai dan kebijakan-kebijakannya.

¹¹ You Ji, "Missile Diplomacy and PRC Domestic Politics", dalam Greg Austin (ed), *Missile Diplomacy and Taiwan's Future: Innovations in Politics and Military Power*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pacific and Asia Studies Australian national University, 1997, hlm 43.

D. ANCAMAN PERUBAHAN STRUKTUR BIPOLAR BAGI KEPENTINGAN CHINA

Pengaruh militer yang lebih besar dalam masalah kebijakan luar negeri dan pertahanan didorong oleh faktor perkembangan baru dalam dunia internasional pasca Perang Dingin. Perkembangan baru ini mengubah kekhawatiran para pemimpin China dalam dua hal yaitu bahwa mereka dihadapkan pada masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya yakni mengenai peran mereka di dunia sebagai calon super power baru, bukan lagi sebagai aktor/partisipan sekunder dalam persetujuan politis antara AS dan Uni Soviet.

Perkembangan tersebut juga mengalihkan penekanan dari misi revolusioner global yang kini sudah tidak berlaku lagi ke perhatian baru mengenai peran eksklusifnya di dunia internasional. Hal ini dimotivasi oleh pandangan bahwa China sekali lagi dihadapkan pada pelanggaran atas kemerdekaannya, yang serupa dengan penghinaan imperialis di masa lalu dan yang menghalangi upayanya untuk memperoleh posisi yang tepat di dunia internasional. Pandangan tersebut merupakan pandangan seluruh pemimpin China dan terutama merupakan hal yang penting bagi kalangan militer.

Militer selalu memandang dirinya sebagai pengawal utama bagi kepentingan-kepentingan teritorial dan kehormatan nasional. Gambaran diri seperti ini tidak dapat dipisahkan dari sifat arogan dan patriotis yang merupakan karakteristik universal militer apapun. Dalam TPR, nasionalisme ini memiliki kualitas yang jelas karena para perwira TPR berperan dalam lingkungan patriotis yang kuat. Lingkungan itu secara berkesinambungan memberikan inspirasi bagi mereka dengan nilai-nilai nasionalistik dan memberikan mereka makna sebagai nilai-nilai tersebut.

Keterlibatan militer dalam masalah luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi internasional yang timbul setelah Perang Dingin dan jatuhnya Uni Soviet. Secara resmi, Perang Dingin, berakhir pada tahun 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 9 Nopember 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada

tanggal 3 Oktober 1990. Perkembangan ini disusul dengan bubarnya Uni Soviet tanggal 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara.¹² Hal ini mengakibatkan perubahan dalam strategi China dan memberi tanggung jawab baru bagi para pemimpin militernya. Perubahan dalam pertimbangan strategis global yang timbul akibat runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur dan kesepakatan yang dicapai kedua negara adidaya mengenai pengawasan senjata membuat pemimpin China harus mengkaji ulang peran mereka dalam tata dunia baru. Perubahan sistem internasional karena berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh berkurangnya ancaman nuklir global AS-Uni Soviet, jika dilihat dari sisi keamanan, kini condong bergeser dari bipolar menjadi multipolar sekaligus ditandai pula oleh munculnya fenomena instabilitas regional yang dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sistem internasional.¹³

Para pemimpin China menilai bahwa perubahan-perubahan yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin justru semakin menegaskan ketidakpastian di dunia internasional. Meskipun struktur bipolar sudah runtuh, struktur baru masih belum menampilkan bentuk yang jelas. Tatanan dunia lama setidaknya memberikan suatu kepastian mengenai adanya perseteruan antara Timur dan Barat, kekuatan militer merupakan ukuran keamanan suatu negara, serta ideology menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Tatanan dunia baru menawarkan kesempatan bagi peningkatan kondisi kemanusiaan namun tidak dapat memberikan jaminan akan terciptanya keadaan yang lebih stabil dan damai. Tatanan baru tersebut justru menciptakan masalah dan tantangan baru yang harus dihadapi masyarakat internasional. Dunia pasca Perang Dingin, misalnya harus menghadapi pecahnya konflik-konflik etnik, teritorial dan agama.

Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya sistem bipolar juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pemimpin China akan munculnya tatanan dunia yang bersifat unipolar dengan AS sebagai kekuatan utamanya. Sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia, AS dikhawatirkan akan berupaya menciptakan suatu tata dunia baru yang

¹² Juwono Sudarsono, "State of the Art Hubungan Internasional : Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional", dalam *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Depok : Pustaka Jaya, 1996, hal 3.

¹³ *Op.Cit*, hal 37.

didasarkan pada nilai-nilai, kebudayaan dan ideology Barat. Berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan AS terhadap China menyusul terjadinya peristiwa Tiananmen memperburuk hubungan kedua negara dan mendorong China untuk menilai sikap AS tersebut sebagai bagian dari kebijakan *peaceful evolution* yang bertujuan untuk menghapuskan sistem sosialis yang saat ini hanya dianut oleh sedikit negara di dunia. China juga berpandangan bahwa AS dan negara-negara Barat lainnya sedang berupaya untuk mendominasi badan-badan dunia seperti PBB dengan memaksakan nilai-nilai mereka, seperti demokrasi, hak asasi manusia dan intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara.

Kecurigaan China tersebut seperti mendapat pembenaran dengan kecenderungan masyarakat internasional sejak krisis Kosovo dan selalu dibenarkan oleh negara-negara barat untuk mendorong penggunaan konsep *humanitarian intervention* yang menjadikan isu hak asasi manusia sebagai alasan untuk melakukan intervensi dalam masalah dalam negeri orang lain. Insiden pemboman Kedutaan Besar China di Beograd oleh NATO menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin China akan menjadi preseden masyarakat internasional terhadap penanganan kelompok-kelompok minoritas yang tersebar di banyak negara termasuk China. Bagi China, insiden tersebut akan menjadi faktor stimulus atau rujukan bagi menguatnya gerakan-gerakan separatisme di Tibet, Xinjiang dan Taiwan. Setelah insiden tersebut, Presiden Jiang Zemin banyak mendapat tekanan dari kelompok-kelompok garis keras di China untuk merevisi *guidelines* hubungan China-AS, termasuk gagasan pembentukan kemitraan strategis dan konstruktif (*constructive and strategic partnership*). Pandangan kelompok garis keras tersebut mendapat dukungan dari anggota-anggota parlemen dan para pejabat TPR yang konservatif.

Kekhawatiran China terhadap hegemoni AS semakin meningkat dengan rencana negara adidaya tersebut untuk mengembangkan suatu “payung pertahanan” (defense umbrella) dengan istilah *Theatre Missile Defense* (TMD) untuk melindungi pasukan AS dan sekutu-sekutunya dalam menghadapi jangkauan misil jarak pendek dan menengah. “Payung Pertahanan” tersebut akan meliputi Jepang, Korea Selatan dan Kemungkinan

Taiwan. Rencana pengembangan sistem pertahanan ini mulai dibicarakan setelah Korea Utara melakukan uji-coba rudal balistik jarak menengah pada akhir Agustus 1998 yang melintasi wilayah Jepang. Penembakan misil oleh Korea Utara tersebut membuat AS berpendapat bahwa perjanjian pertahanan dengan Jepang, Korea Selatan dan Taiwan serta kehadiran pasukan AS yang kuat merupakan kunci bagi stabilitas di Asia Timur. Meskipun pihak AS dan Jepang menegaskan bahwa TMD bersifat defensif dan proyek TMD adalah proyek riset yang belum tentu dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Pemimpin China menilai rencana pengembangan TMD tersebut sebagai ancaman serius dan dapat membahayakan hubungan China-AS serta dapat memicu perlombaan senjata baru di kawasan. Dalam suatu konferensi pers setelah sesi ke-2 sidang Kongres Rakyat Nasional ke-9, Perdana Menteri China, Zhu Rongji, menekankan bahwa China sangat menentang proyek TMD terutama gagasan untuk menyertakan Taiwan dalam proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional mengenai misil dan merupakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan China serta turut campur dalam masalah internal China.

Masalah lain yang mengkhawatirkan China akan hegemoni AS adalah pedoman kerjasama keamanan antara AS-Jepang (New Guidelines for US-Japan Defense Cooperation) diratifikasi oleh Diet Jepang bulan Mei 1999, yang dicurigai akan mencakup wilayah China dan Taiwan. Kebijakan Jepang untuk meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan AS dinilai pemerintah China bertolak belakang dengan kondisi kawasan dan dunia internasional saat ini dimana ketegangan cenderung semakin menurun.

Upaya kalangan tertentu dalam Kongres AS untuk mengeluarkan apa yang disebut sebagai Taiwan Security Enhancement Act semakin memperkuat kecurigaan China akan upaya negara adidaya itu untuk mencampuri masalah dalam negerinya. Upaya tersebut dipandang oleh China sebagai usaha AS untuk membangun dasar hukum bagi penjualan senjata canggih ke Taiwan dan meningkatkan kerjasama militer dengan Taiwan. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan China.

Pecahnya Perang teluk bulan Januari-Februari 1991 membuat China menyadari akan prospek terjadinya konflik regional. Perang Teluk menyadarkan para pemimpin China bahwa kekuatan regional yang diilhami oleh semangat nasionalis dan keagamaan namun tanpa sistem persenjataan yang canggih dan kekuatan pertahanan mutakhir dan kekuatan pertahanan yang terlatih baik bukanlah tandingan bagi negara adidaya dengan persenjataan mutakhir dan kekuatan pertahanan profesional serta memperoleh dukungan dari PBB dan sekutu-sekutunya. China menyadari bahwa Perang Teluk tidak menghalangi kedua adidaya untuk terus mengurangi kehadirannya di wilayah pengaruh mereka.

Ketidakpastian lingkungan internasional yang semakin tajam tersebut meyakinkan para pemimpin China akan semakin mendesaknya modernisasi kemampuan militer untuk mengantisipasi situasi internasional yang tidak menentu. Militer yang profesional dan kekuatan militer yang canggih merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan integritas teritorial dan memberikan lingkungan yang aman bagi kelangsungan pembangunan perekonomian China. Seperti yang terjadi dengan negara-negara lainnya, berakhirnya Perang Dingin juga mengubah lingkungan keamanan China. Hal ini mendorong para pemimpin China untuk melakukan pengkajian ulang secara mendalam terhadap struktur dan doktrin strategi kekuatannya.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, pertikaian teritorial merupakan salah satu faktor yang menjadi pendorong mengapa negara-negara semakin mempersenjatai diri. Negara-negara di dunia akan tetap mempertahankan senjata mereka selama sistem internasionalnya yang “anarkhis” belum menjamin keamanan atau selama negara-negara merdeka belum mampu untuk menyelesaikan persoalannya melalui saluran non militer. Pada intinya, senjata tidak akan diperlukan hanya apabila negara-negara telah mengalami perombakan.

Situasi internasional yang timbul setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet menyebabkan terjadinya perubahan dalam strategi China dan memberi tanggung jawab baru bagi para pemimpin militernya. Selama Perang Dingin,

kekhawatiran para pemimpin China adalah adanya analisa mengenai ancaman dari kedua adidaya. Tahun 1950, ancaman itu datang dari AS, tahun 1960, ancaman tersebut berasal dari AS dan Uni Soviet dan tahun 1970, Uni Soviet dianggap sebagai ancaman utamanya. Selama periode tersebut, satu-satunya dari TPR adalah mempertahankan China dari invasi pihak asing.

Sampai sebelum berakhirnya Perang Dingin, ancaman Uni Soviet dan kemungkinan akan terjadinya pertempuran dengan Uni Soviet disekitar wilayah China dalam intensitas yang tinggi merupakan obsesi kebijakan pertahanan China. Sampai awal tahun 1980, kekhawatiran terhadap ancaman Uni Soviet ini memungkinkan militer untuk mengontrol akses sumber daya nasional dalam konteks program modernisasi ekonomi untuk memperluas kemampuan militer China secara berkesinambungan. Pada pertengahan 1980-an, modernisasi ekonomi menjadi prioritas utama dan pengeluaran untuk pertahanan mulai menurun. Selanjutnya prioritas tersebut kembali diberikan kepada militer untuk pelaksanaan putaran baru modernisasi bidang militer. Perubahan tersebut terjadi pada saat China melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki citranya di dunia internasional yang memburuk setelah peristiwa Tiananmen tahun 1989.

Persepsi para pemimpin China mengenai ancaman mengalami perubahan secara dramatis pada sekitar tahun 1975-1985 ketika sidang ke-3 Komite Pusat ke-11 bulan Desember 1978 menyatakan bahwa Uni Soviet bukanlah ancaman militer bagi keamanan China. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri Uni Soviet yang dianggap agresif dipandang sebagai ancaman bagi China di masa datang. Penggelaran kekuatan Uni Soviet di sepanjang perbatasannya dengan China dipandang sebagai ancaman langsung bagi keamanan China. Para pemimpin China juga melihat adanya pegeseran perimbangan kekuatan secara global antara AS dan Uni Soviet dimana keduanya berada pada kondisi “stalemate”.

China juga melihat adanya perubahan besar dalam sistem internasional. Dinamika jangka panjang dari sistem internasional tersebut menciptakan suatu kondisi dimana pengaruh Uni Soviet dan AS di dunia internasional mengalami kemerosotan.

Melemahnya pengaruh AS dan Uni Soviet disebabkan oleh kompetisi yang terjadi diantara mereka sedangkan kemerosotan ekonomi mengurangi pengaruh politik mereka. Pada saat yang bersamaan, perekonomian negara-negara di Eropa, Jepang dan beberapa dunia ketiga menguat dan tumbuh pesat sehingga memiliki kebebasan yang lebih luas dari pengaruh AS dan Uni Soviet. Peningkatan ekonomi tersebut menyebabkan negara-negara tersebut memiliki kemampuan untuk meningkatkan anggaran militernya. Setelah runtuhnya bipolar, negara-negara ini tumbuh menjadi kekuatan regional yang membentuk sistem multipolar.

Adanya tatanan dunia yang multipolar tersebut tidak menjamin akan adanya lingkungan internasional yang lebih aman. Adanya *balance of power* antara dua adidaya menghindarkan terjadinya perang antara keduanya sehingga menghindarkan terjadinya perang dalam skala global. Tumbuhnya kekuatan regional justru meningkatkan kemungkinan akan terjadinya perang dalam skala lokal. Bagi para analis China, aspek paling mengkhawatirkan dari munculnya lingkungan global tersebut adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya perang dalam skala kecil disekitar wilayah China. Meskipun kecil kemungkinan terjadinya agresi terhadap China, ancaman di sepanjang perbatasannya mungkin saja mengalami peningkatan. Ancaman tersebut mungkin datang dari India yang mengalami konfrontasi di perbatasan sebelah utara dan sebelah barat, militerisasi Jepang yang dianggap melebihi kebutuhan pertahanan nasionalnya, konflik teritorial dan perdebatan mengenai kepentingan dan hak-hak kelautan antara China-Vietnam, sengketa dengan beberapa negara ASEAN mengenai Kepulauan Spratly yang belum dapat diselesaikan serta meningkatnya kekuatan militer Taiwan yang dibarengi dengan menguatnya dukungan atas ide kemerdekaan. Ancaman terhadap integritas wilayah China tersebut tentunya tidak dapat diabaikan.

Dengan wilayah perbatasan laut dan udara seluas lebih dari 18,600 mil yang sebagian besar berbatasan dengan wilayah-wilayah “negara adi daya dan hegemon-hegemon lokal”, China memiliki banyak wilayah konflik yang perlu mendapat perhatian. Konflik-konflik perbatasan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya perang lokal.

Pertentangan-pertentangan di wilayah perbatasan dan etnis minoritas yang berada di kedua wilayah perbatasan merupakan masalah yang dapat menimbulkan konflik antara China – Rusia. Namun demikian, saat ini Rusia lebih dipandang sebagai penyeimbang dalam menghadapi ancaman AS dan Jepang daripada sebagai ancaman yang serius. Sebaliknya, Rusia juga menganggap China sebagai negara yang penting untuk mengimbangi AS, Eropa dan Jepang. Dalam pertemuan-pertemuan puncak China-Uni Soviet tahun 1992, 1994 dan 1995 telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam upaya mengatasi perbedaan-perbedaan mengenai wilayah perbatasan, peningkatan yang tajam dalam perdagangan dan transfer persenjataan serta teknologi militer Rusia kepada China. Selanjutnya kedua negara juga telah sepakat untuk menarik kekuatannya masing-masing sepanjang 100 km yang selesai tahun 2000 menyusul pengurangan pengeluaran regional besar-besaran oleh masing-masing pihak secara unilateral. Dalam peringatan 50 tahun Perang Dunia II, Presiden Boris Yeltsin dan Presiden Jiang Zemin menjanjikan suatu kerjasama baru yang saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan membina hubungan bertentangan baik dan bersahabat.

Persepsi China mengenai ancaman di wilayah Xinjiang adalah pemberontakan *pan-Islamic* dan *pan-Turkic* yang telah memberontak melawan pemerintahan sejak 1946. Ancaman tersebut timbul kembali dengan jatuhnya Uni Soviet yang menyebabkan bermunculannya negara-negara baru di sepanjang perbatasan Xinjiang. Terjadinya berbagai kerusuhan dan demonstrasi mendapat kritik tajam dari pers setempat sebagai gerakan separatis dan kontra revolusi yang didorong kekuatan asing. Kemerdekaan Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan di seberang perbatasan telah membuka kemungkinan berkembangnya perekonomian di Xinjiang melalui perdagangan lintas batas agar tidak terlalu tertinggal dengan perekonomian propinsi-propinsi yang ada di pesisir. Sebaliknya, perdagangan tersebut juga membuka pandangan politik untuk mendirikan pemerintahan berdaulat yang terpisah dari China. Meskipun terdapat konsentrasi TPR yang kuat di wilayah tersebut, dukungan logistic bagi TPR sangat bergantung pada jalan kereta api satu jalur yang rawan terhadap badai pasir dan banjir. Dengan luas wilayah membentang sepanjang 1,6 juta kilometer persegi, Xinjiang secara strategis berbatasan dengan 8 (delapan) negara. Nilai ekonomis wilayah ini terletak di

Tarim Basin yang menyediakan sepertujuh dari keseluruhan cadangan minyak dan seperempat dari keseluruhan cadangan gas China. Dengan demikian, ancaman keamanan di Xinjiang perlu mendapat perhatian serius.

China juga masih memiliki masalah perbatasan dengan India. China mengklaim bahwa setelah perang perbatasan China-India tahun 1962, angkatan bersenjata India secara bertahap menduduki wilayah diselatan garis Mc Mohan padahal China telah menarik diri secara sukarela dari garis tersebut pada bulan Nopember 1962. Tahun 1967, China mengajukan keberatan kepada India pada saat negara Arunachal Pradesh dibentuk diluar wilayah Timur Laut India yang diklaim oleh China. Kerusuhan di Lhasa tahun 1987 dan 1988 semakin meningkatkan sensitivitas China dalam masalah perbatasannya dengan India dan militer menganggap wilayah tersebut sebagai daerah yang potensial bagi terjadinya konflik bersekala besar. Upaya-upaya yang dilakukan India secara diam-diam untuk “melindungi” Dalai Lama dari publikasi menunjukkan kepedulian India agar kerusuhan yang terjadi di Lhasa tidak sampai menghalangi pembicaraan mengenai masalah perbatasan dengan China. Namun demikian, kedua negara masih terus mengeluhkan adanya gangguan di perbatasan dan penggelaran militer di kedua sisi perbatasan yang disengketakan. Karena hal-hal tersebut, China berpendapat bahwa India adalah negara yang berpotensi untuk menjadi ancaman yang serius.

Masalah lain yang merupakan ancaman bagi China adalah masalah tuntutan kemerdekaan di Tibet. Masalah ini menjadi sangat serius karena sorotan dunia internasional dan prestise Dalai Lama yang oleh Beijing dicurigai mendapat dukungan dari AS. Belum adanya kesepakatan mengenai masalah perbatasan dengan India yang memacu terjadinya perang China-India tahun 1962 menambah dimensi strategis dari masalah tersebut. Meskipun hubungan China-India sejak tahun 1988 diwarnai *détente*, China tetap mengkhawatirkan peran India dalam perjuangan rakyat Tibet.

Konflik-konflik di sepanjang perbatasan China dengan negara-negara tetangganya serta isu separatisme di Xinjiang dan Tibet sangat berpotensi untuk berkembang menjadi konflik yang mengancam keamanan dan kedaulatan wilayah China. Namun demikian,

ancaman utama yang menjadi pusat perhatian China adalah masalah Taiwan dan kluarnya di Laut China Selatan.

Masalah Taiwan merupakan masalah warisan perang saudara antara Partai Komunis China (PKC) dan Partai Nasionalis China (PNC). Setelah kalah dalam perang tersebut 1949, para pendukung PNC yang dipimpin Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan nasionalis. Sejak itulah Taiwan menjadi masalah serius bagi kedaulatan dan integritas China yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, terlebih dengan adanya dukungan AS terhadap Taiwan. Dalam masalah Taiwan, China melihat adanya dua persoalan pokok yang membuat rumit masalah tersebut yaitu masalah hubungan luar negeri Taiwan dan masalah perundingan mengenai reunifikasi.

Pemerintah China berpendapat bahwa masalah Taiwan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan umum yang terjadi di kawasan Asia Timur, khususnya keterlibatan AS dan Jepang. Pemerintah China menilai bahwa keterlibatan kedua negara tersebut telah berlangsung sejak Presiden Henry Truman mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Taiwan sebagai “*unsinkable aircraft carrier*” AS. Disahkannya RUU *Taiwan Security Enhancement Act* oleh Kongres AS semakin menimbulkan kekhawatiran pemerintah China terhadap keterlibatan AS dalam masalah Taiwan. Apalagi saat ini AS terikat kerjasama dengan Jepang dalam “*The New Japan-US Security Guidelines*”. Tidak tertutup kemungkinan kedua negara tersebut akan memasukkan Taiwan ke dalam “*guidelines*” pertahanan tersebut di masa depan karena dalam salah satu pengaturannya disebutkan bahwa AS akan memberikan perlindungan kepada Jepang dan daerah sekitarnya. Diumumkannya penjualan 150 buah pesawat F-16 oleh AS kepada Taiwan serta diijinkannya presiden Taiwan, Lee Teng-hui, untuk menghadiri acara di Universitas Cornell yang merupakan alumninya telah menambah kekhawatiran China akan campur tangan AS dalam masalah Taiwan. Dalam pertemuan dengan Kepala-kepala perwakilan ASEAN di Beijing (*ASEAN Committee in Beijing/ACB*) tanggal 15 Maret 1999, Menlu Tang Jiaxuan menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan politik luar negeri China

memberikan ruang fleksibilitas namun dalam masalah Taiwan, pemerintah China tetap tidak akan bersikap fleksibel.

Dalam masalah reunifikasi, pemerintah China menegaskan posisinya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tujuan bertumpu pada “*peaceful reunification*” serta proposal “*one country, two systems*”, seperti yang telah diterapkan di Hongkong dan Macau. Pemerintah China tetap berpendapat bahwa proposal tersebut merupakan langkah yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah Taiwan. Dalam upaya menyelesaikan masalah reunifikasi ini, kedua pihak selama ini memanfaatkan dua badan semi pemerintahan yaitu ARATS (*Association for Relations Across Taiwan Straits*) China dan SEF (*Straits Exchange Foundation*) Taiwan sebagai forum untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang dapat diajukan kepada pemerintah masing-masing.

Kontak antara kedua lembaga tersebut sempat terganggu dan belum pulih sejak ketegangan hubungan kedua pihak setelah pada bulan Juli 1999, “presiden” Lee Teng-hui mengajukan gagasan “*special state-to-state relations*” dalam hubungan China-Taiwan di masa datang. Pernyataan tersebut ditentang keras oleh pemerintah China karena dinilai sebagai upaya wilayah tersebut untuk memisahkan diri. Namun demikian, China masih tetap pada posisinya yaitu mengupayakan reunifikasi secara damai. Penggunaan kekuatan bersenjata akan dilakukan pemerintah China sebagai pilihan paling akhir yaitu apabila para pemimpin Taiwan memilih mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan atau apabila ada campur tangan pihak luar secara militer dalam masalah Taiwan.

Terpilihnya Chen Sui-bian sebagai presiden Taiwan dalam pemilu bulan Maret 2000 tidak membawa pengaruh positif terhadap hubungan kedua pihak bahkan dapat dikatakan justru semakin memperkuat *status quo* hubungan keduanya. Dalam pidato pelantikannya bulan Mei 2000, Chen Sui-bian menegaskan bahwa dirinya tidak akan mendeklarasikan Taiwan merdeka, tidak akan memasukan teori dua negara ke dalam konstitusi dan tidak melakukan referendum untuk masa depan Taiwan selama masa jabatannya. Namun ia juga tidak secara eksplisit mengakui prinsip “satu China” yang ditetapkan sebagai

prasyarat RRC bagi kelanjutan perundingan antara ARATS dan SEF. Sikap ini dikecam China karena dianggap akan melanggengkan status quo.

Masalah Laut China Selatan juga menjadi kekhawatiran China yang utama. China terlibat konflik teritorial dengan Vietnam, Malaysia, Philipina, Brunei berkaitan dengan klaimnya atas kepulauan Spratly dan beberapa pulau atoll di Laut China Selatan. Klaim China tersebut didasarkan pada kedaulatan historisnya. Selain itu, wilayah tersebut kaya akan sumber mineral. Keyakinan akan adanya kekayaan alam itulah yang membuat wilayah tersebut disengketakan oleh banyak negara. Bulan Pebruari 1992, Kongres Rakyat Nasional (KRN) mengadopsi Hukum Kewilayahan dan Hukum Laut yang mengesahkan klaim China atas kedaulatan teritorialnya di semua wilayah yang sedang dipersengketakan termasuk Kepulauan Diaoyu, Parcel dan Spratly dan memberikan hak untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencegah pelanggaran diwilayah perairannya. Peta China menunjukkan hampir seluruh Laut China Selatan berada dalam perbatasan China meskipun garis batas yang lebih spesifik tetap harus ditetapkan. Sehubungan dengan klaim tersebut, China terlibat dalam beberapa insiden militer dalam skala kecil dengan negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah yang masih terus dipersengketakan tersebut. Keinginan China yang kuat untuk tetap mempertahankan klaim teritorialnya tampaknya akan terus mengurangi kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik dengan tetangganya di Asia Tenggara.

Konfrontasi yang paling menonjol di Laut China Selatan sebelum tahun 1995 adalah insiden antara China dan Vietnam atas kepulauan Paracel dan Spratly. Tahun 1995, beberapa insiden antara China dan Philipina membuat masalah Spratly menjadi perhatian dunia internasional. Pendudukan China atas sebuah atol yang diklaim oleh Philipina memaksa pemerintah Philipina untuk memobilisasi dukungan internasional melalui media massa mengenai wilayah sengketa tersebut. Tindakan Philipina ini dianggap sebagai “provokatif” dan menyatakan bahwa reaksi militer mungkin saja akan terjadi diwaktu lain. Tindakan Angkatan Laut Philipina yang menghancurkan pembatas yang ditempatkan China di pulau tersebut memicu berbagai peringatan dan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi mengingat China sejauh ini telah menahan militernya.

Untuk mengatasi masalah klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, pada tahun 1992, ASEAN berhasil menyelesaikan Deklarasi Manila yang menyerukan dihentikannya peningkatan kekuatan militer di Spratly dan penyelesaian damai terhadap semua sengketa. Pemerintah China mengusulkan adanya eksplorasi bersama yang dinegoisasikan secara bilateral dengan negara-negara *Claimant* lainnya namun menekankan bahwa masalah kedaulatannya tidak menjadi isu yang dibicarakan. Konfrontasi antara China-Philipina tahun 1995 mendorong ASEAN untuk membicarakan sengketa teritorial tersebut dalam pertemuan tingkat wakil menteri dengan perwakilan China yang menolak pembicaraan multilateral. Namun dengan masuknya Vietnam menjadi anggota ASEAN bulan Juli 1995, dalam pertemuan *ASEAN Regional Forum* (ARF), China setuju untuk membicarakan masalah tersebut ditingkat multilateral sebagai konsesi taktikal. China mengharapkan agar masalah Laut China Selatan ini dapat diselesaikan secara damai dan bersahabat melalui dialog-dialog bilateral antara para *Claimant*. Namun demikian, China menolak untuk membawa masalah ini ke *International Court of Justice* (ICJ) atau forum internasional lainnya karena khawatir tindakan tersebut justru akan mengundang intervensi pihak ketiga yang akan semakin memperumit masalah berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga di Laut China Selatan. Sampai saat ini, upaya menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan masih terus diupayakan antara lain melalui penyelenggaraan lokakarya Laut China Selatan yang berlangsung setiap tahun serta usul ASEAN untuk merumuskan suatu regional code of conduct di Laut China Selatan.

Di China, istilah “perang lokal” (local war) digunakan secara bergantian dengan istilah “konflik berintensitas rendah” (*low-intensity conflict*) dan “perang terbatas” (*limited war*). Istilah tersebut merujuk pada lingkungan konflik yang berkisar pada skala konflik tingkat rendah sampai ke tingkat menengah. Perang Lokal adalah pertempuran yang dilaksanakan pada tempat, waktu dan cara-cara terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan yang terbatas pula. Karakteristik perang ini adalah penggunaan teknologi tinggi, proyeksi kekuatan yang cepat dan dilakukan dengan intensitas tinggi di dalam lingkungan konflik berintensitas rendah. Doktrin China mengenai Perang lokal yang terus

berkembang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan dapat dianggap sebagai konflik berintensitas menengah dengan waktu yang panjang.

Dengan kemungkinan timbulnya ancaman dari sekitar wilayah perbatasannya yang dapat memicu konflik regional, TPR harus memiliki kemampuan untuk berperang di luar perbatasan China. Untuk itu, diformulasikan suatu kebijakan untuk membentuk kekuatan baru yakni pembentukan unit reaksi cepat yang lebih mobil, terlatih baik dengan perlengkapan yang juga lebih baik. Kebijakan yang dijalankan pada tahun 1990-an ini menekankan pada unit-unit angkatan laut, angkatan udara dan pasukan elit angkatan darat.

E. MILITER CHINA DIBAWAH HUJINTAO

Hu jintao, diangkat menjadi Presiden China menggantikan Jiang Zemin pada September 2004, dan menggantikan posisi ketua di CMC, Posisi ini sangat strategis yang memungkinkan Hu Jintao berkuasa atas TPR. Sebelumnya menjabat ketua CMC, jabatan Hu adalah wakil CMC. Didalam CMC, Hu dibantu oleh dua vice chairman yaitu Guo Boxiong dan Xu Caihou. Dalam masa kepemimpinannya Hu dibantu oleh general staff Chen Bingde, Li Jinai dan Liao Xilong. Dalam kepemimpinan Hu mengangkat komandan AL TPR Wu Shengli dan Komandan AU TPR Xu Qiliang. Selanjutnya karakteristik militer China di bawah Hu jintao adalah memasukan jenderal baru sebagai pimpinan di CMC, Mempromosikan teknologi profesional dan memberikan point penting gerakan separatisme seperti Xinjiang, Tibet dan Taiwan.

Dalam pidato dalam kongres PKC ke-17 Hu Jintao memerintahkan dalam upaya Modernisasi militer China ditegaskan kembali dalam pidato kongres PKC ke-17, Hu Jintao memerintahkan Pembangunan militer berdasarkan Science dan Tehnology dengan berbasis pada IT Warfare. Selanjutnya anggaran militer selalu naik pertahun. Anggaran militer China pada 2008 adalah US Dollar 60 milyar. Terdapat 8 agenda modernisasi militer China yaitu nuklir deterrence, information supremacy, mid and long range precision strike capability, three dimensional maritime operation, air supremacy, ground

force mobility, long range power projection, dan efficient command and control. Selanjutnya dalam memasuki era transformasi, mengambil kesempatan dari pembangunan ekonomi dan perkembangan teknologi. Transformasi dipandu oleh strategi pertahanan baru dengan persiapan terhadap perang dan mentalitas yang kokoh.

Sejalan dengan pengembangan modernisasi militer China (Ramification Military Affair) maka militer China mulai mengurangi jumlah personilnya dari 2.300.000 personil menjadi sekitar 1,6 juta personil pada tahun 2008 ini. Doktrin tempur berubah dari pertempuran darat yang menggunakan kuantitas manusia ke modernisasi dan penggunaan Tehnologi militer yang canggih. Militer China (PLA) kini terdiri dari AD, AL, AU dan Angkatan Roket Strategis (Angkatan Artileri Kedua) yang merupakan kekuatan nuklir China. Angkatan khusus nuklir ini mengoperasikan rudal ICBM DF-5/Dong Feng (Angin Timur) yang mampu mencapai sasaran 13.000 km dari 20 silo/tempat peluncuran tetap yang disebar di berbagai tempat. Kekuatan Angkatan Udara (PLAAF) terdiri dari 7 regional Commands (yang memiliki jet tempur, bombers, transwar dan brigade pertahanan rudal udara) Angkatan Udara memiliki 400.000 personil. Kekuatan Angkatan Laut : Memiliki kekuatan 3 Fleets, 9 nuklir submarine Unit, Naval Aviation, 13 Naval Supporting bases, 6 Major Surface Warship, 3 Submarine, 2 Brigade Marinir, Cost Defense Troops dan 300.000 personil.